KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kasus Gratifikasi Anas : Pembatalan Proyek Gedung DPR Tak Hilangkan Dugaan Korupsi
Tanggal : Jumat, 01 November 2013
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : A6

Kasus Gratifikasi Anas

Pembatalan Proyek Gedung DPR Tak Hilangkan Dugaan Korupsi

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengusut tuntas kasus korupsi pembangunan gedung baru DPR. Meski pembangunan itu akhirnya batal, bukan berarti tidak ada potensi kerugian negara.

"Saya kira, sinyalemen adanya pihak-pihak yang bermain-main dalam proyek gedung baru DPR yang kemudian batal diteruskan itu tetap menarik untuk diselidiki untuk mencegah kerugian negara," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Martin Hutabarat di Jakarta, Jumat (1/11).

Dia menambahkan, pembatalan pembangunan tidak menghilangkan unsur korupsi atau suap yang kemungkinan terjadi. "KPK harus telusuri anggota DPR periode ini yang diduga terima suap dari pelaksana proyek," tegas anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam mengaku tidak mengetahui perkembangan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan gedung baru DPR. "Pada 2011 lalu kita pernah laporkan kasus itu (korupsi proyek gedung DPR) ke KPK. Sampai sekarang kita belum tahu perkembangannya," kata Roy.

Dia berharap KPK tidak menghentikan pengusutan kasus tersebut. "Kita tentu harap kasus itu tidak terhenti. Apalagi ketika DPR putuskan tidak lanjutkan proyek pembangunannya," tegas Roy.

Menurutnya, KPK dapat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penggunaan anggaran sebelum 2011. Dijelaskan, anggaran itu digunakan untuk perencanaan gedung baru DPR.

"Kita harap kasus ini segera ada upaya pengungkapan yang lebih cepat. Kita berpegang bahwa tidak hanya sampai ke gedung itu tidak jadi dibangun. Tapi bagaimana proses *abuse of power* dalam perencanaan gedung itu harus diungkap," tandasnya.

Seperti diketahui, KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk tersangka Anas Urbaningrum. Kesalahan yang dituduhkan kepada Anas tampaknya bukan hanya soal gratifikasi dalam kasus Hambalang. Anas diduga terlibat dalam rencana pembangunan gedung baru DPR.

Mantan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Refrizal mengaku tidak mengetahui persis keterlibatan Anas dalam proyek gedung baru DPR.

"Terlibat atau tidaknya Anas secara langsung saya enggak tahu," kata Refrizal.

Akan tetapi, Refrizal sempat kaget dengan satu perusahaan yang mengikuti tender proyek gedung baru DPR. Apalagi, perusahaan tersebut bukan dari badan usaha milik negara (BUMN). Pasalnya, BURT meminta pemenang tender sebaiknya dari perusahaan BUMN.

Menurutnya, tidak lama setelah itu ada penangkapan di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, pimpinan BURT akhirnya memutuskan menghentikan pembangunan gedung baru DPR.

Adapun, kelima perusahaan yang lolos seleksi tahap awal tender gedung baru DPR adalah PT KSO Adhi Karya- Wika, PT PP (Persero), PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Duta Graha Indah Tbk. Selanjutnya, Direktur PT DGI, MEI, terlibat kasus suap proyek Kempora. MEI tertangkap basah bersama R dan Sekretaris Kempora. [C-6]



ANTARA/WIDODO S JUSUF

Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Nurpati tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/10). Andi Nurpati datang membesuk mantan Menpora Andi Mallarangeng yang ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Perpustakaan DPR